JTAMPS: Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi
https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jtamps/index
Vol.05, No. 2 (Oktober, 2025), pp. 521-530
e-ISSN: 2776-2963 p-ISSN: 2776-3110

Protes 'Indonesia Gelap': Dampak Efisiensi Anggaran Pendidikan terhadap Pendidikan dan Masa Depan Bangsa

Daniel[1], Muh. Nurikhsan [2], Jumadi[3], M Ridwan Said Ahmad[4]

[1] Universitas Negeri Makassar; d482442@gmail.com,
[2] Universitas Negeri Makassar; mnrkhsan@gmail.com
[3] Universitas Negeri Makassar; jumadi@unm.ac.id
[4] Universitas Negeri Makassar; m.ridwan.said.ahmad@unm.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Dark Indonesia, Budget Efficiency, Education.

Article history:

Received 2025-05-10
Revised 2025-05-12
Accepted 2025-05-15

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the values of the philosophy of science in strengthening literacy and critical thinking of Generation Z. This qualitative study uses a phenomenological approach. Data were collected through literature studies, observations, interviews and documentation, and tested for validity using time and content triangulation. The results of the study indicate that the protests of dark Indonesia regarding budget efficiency towards education and the future of the nation: 1) What drives students in the regions to hold the "Dark Indonesia" demonstration; 2) Budget efficiency is the target of the "Dark Indonesia" demonstration. Data were analyzed through condensation, presentation and drawing conclusions.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

INFORMASI ARTIKEL

Kata Kunci

Indonesia Gelap, Efisiensi Anggaran, Pendidikan.

Article history:

Diterima 2025-05-10
Revisi 2025-05-12
Diterima 2025-05-15

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran nilai-nilai filsafat ilmu dalam memperkuat literasi dan berpikir kritis Generasi Z. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi, wawancara dan dokumentasi, dan diuji keabsahannya menggunakan triangulasi waktu dan isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa protes Indonesia gelap mengenai efisiensi anggaran terhadap pendididikan dan masa depan bangsa: 1) Apa yang mendorong mahasiswa di daerah-daerah menggelar demonstrasi "Indonesia Gelap"; 2) Efisiensi anggaran menjadi objek sasaran dari demonstrasi "Indonesia gelap". Data dianalisis melalui kondensasi, penyajian dan penarikan simpulan.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Penulis Koresponden :

Daniel

Universitas Negeri Makassar; d482442@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2025, mahasiswa di Indonesia mengadakan serangkaian demonstrasi yang dikenal sebagai "Indonesia Gelap" untuk memprotes kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Wikipedia : 2025). Aksi demonstrasi mahasiswa ini merupakan bentuk kritik terhadap situasi negara yang dipandang mengalami kemerosotan di berbagai bidang, mulai dari peningkatan beban utang, pembiaran praktik korupsi, lemahnya pertanggungjawaban pemerintah, hingga terabaikannya kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan laporan Kompas.id, pemicu utama protes tersebut adalah keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi alokasi anggaran pendidikan guna membiayai program pemberian makan gratis bagi anak-anak sekolah yang membutuhkan dana sebesar $28 miliar setiap tahunnya. Kebijakan ini menimbulkan keresahan bahwa sistem pendidikan dan program dukungan sosial lainnya akan mengalami pelemahan.

Para demonstran menentang berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, khususnya yang berkaitan dengan pengurangan anggaran. Mereka juga menyuarakan penolakan terhadap perubahan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai konsesi tambang untuk institusi pendidikan tinggi, sambil mendukung pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Abdurrahman, yang memimpin Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari di Kalimantan Selatan, menyatakan bahwa demonstrasi dengan nama "Indonesia Gelap" dilaksanakan secara bersamaan di berbagai wilayah Indonesia untuk mengkritisi beragam permasalahan yang muncul selama 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Di ibu kota, aksi protes "Indonesia Gelap" yang diorganisir oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berlangsung hingga malam hari sebelum akhirnya peserta membubarkan diri.

Unjuk rasa ”Indonesia Gelap” kembali bergulir di sejumlah daerah, kemarin. Di Semarang, misalnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Barat menggelar demonstrasi ”Indonesia Gelap” di

depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah dan DPRD Kota Semarang. Mereka datang membawa spanduk, karton, dan kertas berisi tulisan bernada kritik pada pemerintah. Beberapa tulisan bernada kritik itu, antara lain, #IndonesiaGelap, Hentikan Pemangkasan Anggaran Pendidikan, Kenyang Gak, Bodoh Iya, #DaruratPendidikan, Oke Gas, Oke Gas, Mana Gas?, Kabinet Makanan Gratisan, Makan Uang Rakyat Gratis, dan Kabinet Gemuk. Sama seperti unjuk rasa mahasiswa di sejumlah daerah, di hari pertama, Senin, dalam demonstrasi, kemarin, para koordinator aksi berorasi mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain meminta ada evaluasi pada kebijakan efisiensi, mahasiswa mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat dan RUU Perampasan Aset. ”Kami menuntut ada revisi UU Kementerian Negara untuk menghentikan kegemukan pada Kabinet Merah Putih dan menuntut percepatan reshuffle terhadap menteri-menteri bermasalah. Kami juga meminta konsesi tambang bagi perguruan tinggi ditolak dan menuntut bentuk militerisasi dalam ranah sipil,” ucap salah satu anggota BEM Universitas Negeri Makassar yang menjadi informan.

Mengenai RUU TNI yang ditentang dan juga mengenai efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dilansir dari Kompas tv DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI meski ditentang mahasiswa. Perubahan Undang-Undang TNI menghadapi penolakan dari kalangan mahasiswa di berbagai wilayah pada hari kemarin, karena dikhawatirkan akan meningkatkan jumlah anggota TNI aktif yang menduduki posisi-posisi sipil, sehingga berpotensi menciptakan tindakan represif dan menghalangi perkembangan kehidupan demokratis. Sementara itu, langkah pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran perlu ditinjau ulang karena dianggap tidak sesuai dengan konstitusi dan dilaksanakan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengalihan dana antar pos anggaran juga seharusnya diselaraskan dengan tujuan pengelolaan keuangan negara yang telah ditetapkan dengan jelas dalam konstitusi, terutama pada alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Beni Kurnia Ilahi, mengatakan, kebijakan

efisiensi anggaran yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 keliru secara hukum dan konstitusi. Dari sisi konstitusional, ada dua parameter yang harus digunakan ketika melakukan pemangkasan anggaran.

Aksi ini mencerminkan kekhawatiran mendalam akan masa depan Indonesia di tengah kebijakan pemerintah yang kontroversial. Mahasiswa, sebagai agen perubahan, berperan penting dalam menyuarakan aspirasi rakyat dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas.

2. METODE

Dalam penelitian ini digunakan metodologi yang komprehensif, diawali dengan kajian literatur dilanjutkan dengan sesi wawancara menggunakan pendekatan kualitatif, yang dianggap sebagai metode yang tepat untuk mengkaji secara mendalam fenomena demonstrasi "Indonesia Gelap". Setelah pengumpulan data selesai, tahap berikutnya adalah melakukan analisis dan interpretasi informasi dalam konteks yang lebih luas. Kajian literatur berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Selama proses ini, peneliti memanfaatkan beragam sumber informasi, termasuk pemberitaan media, artikel jurnal ilmiah, buku referensi, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen-dokumen resmi lainnya. Dengan demikian, kajian literatur tidak hanya menjadi dasar teoritis penelitian, tetapi juga berperan sebagai sumber informasi penting dalam membangun argumentasi dan pemahaman yang lebih menyeluruh.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menekankan pada pemahaman yang mendalam tentang makna dan konteks fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan antarkonsep yang muncul dari literatur yang diteliti. Dalam pelaksanaannya, peneliti perlu mengikuti beberapa langkah penting. Pertama, menentukan fokus penelitian dan pertanyaan yang ingin dijawab. Setelah itu, peneliti harus melakukan pencarian literatur yang relevan secara sistematis dan mengumpulkan data dari sumber-sumber tersebut. Selanjutnya, proses analisis dimulai dengan membaca dan

mencatat informasi penting, mengelompokkan data berdasarkan tema, dan menafsirkan makna dari setiap tema yang ditemukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Apa yang mendorong mahasiswa di daerah-daerah menggelar demonstrasi "Indonesia Gelap"

Pemangkasan anggaran pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi salah satu pemicu utama gerakan demonstrasi mahasiswa. Kebijakan ini dinilai merugikan masa depan generasi muda, terutama dalam konteks peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan laporan yang beredar, alokasi dana pendidikan mengalami pengurangan cukup signifikan karena sebagian besar dialihkan untuk mendanai program makan siang gratis bagi pelajar. Meskipun program tersebut memiliki niat baik, mahasiswa menilai bahwa langkah tersebut mencerminkan ketidakseimbangan dalam kebijakan fiskal pemerintah. Seorang mahasiswa yang ikut dalam aksi protes di Makassar menyampaikan, "Kami bukan menolak program makan gratis, tapi jangan jadikan pendidikan sebagai korban. Bagaimana kami bisa memiliki masa depan yang cerah jika dana untuk pendidikan justru dikurangi?" Demonstrasi bertajuk "Indonesia Gelap" juga lahir dari keresahan terhadap kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar. Banyak mahasiswa dari berbagai daerah merasakan bahwa arah pembangunan dan kebijakan ekonomi saat ini cenderung hanya menguntungkan kota-kota besar, sementara wilayah tertinggal masih bergelut dengan keterbatasan—mulai dari akses pendidikan yang minim, infrastruktur yang buruk, hingga sulitnya mendapatkan bahan bakar bersubsidi, yang pada akhirnya memperparah kondisi kesejahteraan masyarakat.

Mahasiswa di Makassar, misalnya, menyoroti sulitnya memperoleh gas subsidi yang berdampak langsung pada meningkatnya biaya hidup. Salah satu peserta aksi menyuarakan, "Harga kebutuhan pokok makin mahal di daerah kami, sementara pemerintah justru sibuk membangun proyek-proyek besar yang tak menyentuh langsung kehidupan rakyat kecil." Selain isu ekonomi dan pendidikan, mahasiswa juga menyuarakan kekhawatiran mereka atas meningkatnya keterlibatan militer dalam ranah sipil. Dalam beberapa tahun terakhir, penempatan personel militer di

jabatan pemerintahan sipil mengalami peningkatan, yang menimbulkan kekhawatiran akan tergerusnya prinsip-prinsip demokrasi. Di kota-kota seperti Medan dan Surabaya, tuntutan transparansi dalam penunjukan jabatan sipil yang diisi oleh militer menjadi sorotan utama. Para mahasiswa juga mengkritik lemahnya akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara dan penanganan masalah nasional yang dinilai tidak efektif dan tidak berpihak kepada rakyat. Dugaan korupsi yang terus terjadi turut memperbesar rasa frustrasi di kalangan mahasiswa.

Dalam aksi di Makassar, mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Uang Rakyat Bukan untuk Oligarki" sebagai bentuk kritik terhadap dugaan penyalahgunaan dana publik. Seorang akademisi dari Universitas Negeri Makassar menyatakan, "Apa yang dilakukan mahasiswa saat ini mencerminkan penurunan kepercayaan terhadap pemerintah yang dinilai gagal menunjukkan akuntabilitas dan keberpihakan dalam setiap kebijakannya." Secara keseluruhan, aksi demonstrasi "Indonesia Gelap" merupakan ekspresi kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, terutama generasi muda. Beberapa isu sentral yang diangkat dalam gerakan ini mencakup pemotongan dana pendidikan, ketimpangan sosial-ekonomi, keterlibatan militer dalam urusan sipil, serta lemahnya transparansi dan pertanggungjawaban negara. Fenomena ini menegaskan bahwa semangat mahasiswa dalam memperjuangkan keadilan sosial dan mempertahankan nilai-nilai demokrasi di Indonesia masih terus menyala.

3.2 Efisiensi anggaran menjadi objek sasaran dari demonstrasi "Indonesia gelap"

Demonstrasi "Indonesia Gelap" yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai daerah bukan hanya sekadar bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga kritik terhadap efisiensi anggaran yang dinilai tidak berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Mahasiswa menilai bahwa alokasi anggaran negara tidak dilakukan dengan bijak, terutama dalam situasi di mana sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan mengalami pemotongan, sementara program-program yang dianggap kurang prioritas justru mendapatkan porsi besar dalam

APBN. Salah satu pemicu utama demonstrasi ini adalah kebijakan pemerintah yang mengalokasikan anggaran sebesar 28 miliar dolar AS untuk program makan gratis bagi anak sekolah, sementara di sisi lain, terjadi pemotongan anggaran di sektor pendidikan. Mahasiswa menganggap bahwa kebijakan ini tidak memperhatikan keberlanjutan sistem pendidikan dalam jangka panjang. Pendidikan yang seharusnya menjadi investasi utama bagi kemajuan bangsa justru mengalami pengurangan dana, yang berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Dalam berbagai aksi yang terjadi di Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar, mahasiswa menyuarakan keresahan mereka terhadap alokasi anggaran yang tidak efisien. Salah seorang mahasiswa dalam aksi di makassar menyatakan, "Kami tidak menolak program makan gratis, tetapi mengorbankan pendidikan demi program ini bukanlah solusi yang bijak. Pemerintah harus mampu menyeimbangkan anggaran agar tidak ada sektor yang dirugikan." Selain pemotongan anggaran pendidikan, mahasiswa juga menyoroti meningkatnya alokasi anggaran untuk sektor keamanan dan pertahanan. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam belanja militer dan perluasan peran militer dalam pemerintahan sipil. Hal ini dianggap sebagai langkah mundur dalam demokrasi dan berpotensi mengurangi transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Demonstran di Makassar menegaskan bahwa, "Anggaran yang besar untuk sektor militer seharusnya dialihkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkuat otoritarianisme yang membungkam kritik terhadap pemerintah." Selain itu, kalangan mahasiswa juga mempersoalkan sejauh mana kebijakan subsidi pemerintah telah mencapai target yang diharapkan. Salah satu permasalahan yang mendapat perhatian khusus dalam demonstrasi tersebut adalah kelangkaan pasokan gas bersubsidi di berbagai wilayah. Meskipun pihak pemerintah menyatakan telah menyediakan anggaran yang memadai untuk subsidi energi, kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa banyak warga mengalami kesulitan untuk memperoleh gas bersubsidi dengan harga yang terjangkau. Situasi ini semakin memperkuat indikasi adanya kebocoran dalam penggunaan anggaran atau ketidakefisienan dalam sistem pendistribusian subsidi.

Mahasiswa juga menilai bahwa pemerintah terlalu fokus pada proyek infrastruktur besar yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat kecil. Dalam beberapa aksi di Surabaya dan Bandung, mahasiswa membawa spanduk bertuliskan “Uang Rakyat untuk Rakyat, Bukan untuk Oligarki” sebagai bentuk protes terhadap pembangunan proyek-proyek besar yang diduga lebih menguntungkan pihak tertentu daripada masyarakat luas. Kritik ini semakin diperkuat dengan munculnya dugaan bahwa beberapa proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran besar justru dikerjakan oleh perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan elite politik.

Penggunaan anggaran negara secara efisien seharusnya menjadi hal yang diutamakan dalam manajemen keuangan negara, terutama dalam kondisi ekonomi yang mengharuskan penerapan kebijakan fiskal yang lebih cermat. Para mahasiswa mendesak ditingkatkannya keterbukaan dalam pemanfaatan anggaran dan menginginkan pemerintah untuk lebih transparan dalam mempublikasikan laporan keuangan negara ke masyarakat. Tanpa adanya transparansi tersebut, mahasiswa mengkhawatirkan bahwa dana negara akan terus digunakan dengan cara yang tidak efisien dan tidak memberikan dampak yang menguntungkan bagi masyarakat secara umum. Aksi "Indonesia Gelap" pada dasarnya bukan sekadar demonstrasi di jalanan, melainkan juga mencerminkan kecemasan publik terhadap pengelolaan keuangan negara yang dianggap tidak memihak kepentingan rakyat. Gerakan ini memperlihatkan bahwa mahasiswa tetap memainkan peranan penting sebagai pemantau kebijakan pemerintah dan motor penggerak perubahan sosial. Dengan meningkatnya tekanan dari kalangan mahasiswa dan masyarakat, diharapkan pemerintah dapat lebih bijaksana dalam mendistribusikan anggaran negara sehingga benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

4. KESIMPULAN

"Indonesia Gelap" merupakan protes terhadap kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dimana salah satu tuntutunya berisi tentang efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintahan

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini membuat terjadinya protes terhadap kebijakan tersebut. Efisiensi dalam alokasi anggaran pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan dan masa depan bangsa. Meskipun efisiensi bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana, kebijakan ini dapat menimbulkan konsekuensi negatif jika tidak diimbangi dengan pendanaan yang memadai. Di sisi lain, pemangkasan atau alokasi anggaran yang kurang tepat dapat menyebabkan keterbatasan akses pendidikan, penurunan kualitas pembelajaran, dan ketimpangan pendidikan antardaerah.

5. DAFTAR PUSTAKA

Arifah, U. (2018). Kebijakan Publik Dalam Anggaran Pendidikan. Cakrawala: Jurnal Kajian Studi Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial, 2(1), 17-37.

Bakry, A. (2010). Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Jurnal Medtek, 2(1), 1-13.

https://news.ums.ac.id/id/02/2025/indonesia-gelap-dan-aksi-mahasiswa/

https://uinsa.ac.id/blog/indonesia-gelap-demonstrasi-mahasiswa-dan-tagar-kaburajadulu

https://www.ft.com/content/288c3985-8986-4932-a2fe-a0cdd6d1e51b

https://www.hukumonline.com/berita/a/aksi-demo-di-patung-kuda--mahasiswa-bem-si-serukan-indonesia-gelap-lt67b6ff3477c6c/

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/students-lead-dark-indonesia-protests-against-budget-cuts-2025-02-20/

https://www.tempo.co/politik/mahasiswa-hingga-aktivis-gelar-demo-indonesia-gelap-jilid-2-siang-ini-di-jogja-1217888

Iswahyudi, M. S., Irianto, I., Salong, A., Nurhasanah, N., Leuwol, F. S., Januaripin, M., & Harefa, E. (2023). Kebijakan dan inovasi pendidikan: Arah pendidikan di masa depan. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Jiwandono, I. S., & Oktaviyanti, I. (2020). Analisis aksi demonstrasi mahasiswa menolak RUU KUHP dan RUU KPK: Antara sikap kritis dan narsis. Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial, 4(1), 154-162.

Kompas TV, 2025. “apa yang sebenarnya terjadi dengan demonstrasi indonesia gelap. https://www.kompas.id/artikel/apa-yang-sebenarnya-terjadi-dengan-demonstrasi-indonesia-gelap.

Muiz, A., Anisah, R., Khoiruddin, U., & Indrioko, E. (2024). Kebijakan Pendidikan Dalam Mengatasi Masalah Kualitas, Kuantitas Efektivitas dan Efisiensi. IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, 2(3), 46-64.

Patandung, Y., & Panggua, S. (2022). Analisis masalah-masalah pendidikan dan tantangan pendidikan nasional. Jurnal Sinestesia, 12(2), 794-805.